KEPANIKAN FISKAL DAN ANCAMAN PEMULIHAN EKONOMI

Agus Tri Basuki

Abstrak

Sudah tiga tahun lebih krisis ekonomi menerpa perekonomian Indonesia, tetapi hingga saat ini masih diwarnai nuansa ketidakpastian. Ketidakpastian ekonomi Indonesia semakin berlanjut, hal ini dikarenakan proses demokrasi yang sedang berjalan sedang menemui jalan buntu, yaitu berseterunya antara DPR dan Presiden.

Jika hal ini berlanjut maka akan mengakibatkan meningkatnya "country risk". Dengan berbagai permasalahan yang mendasar dan faktor ketidakpastian tersebut, proses pemulihan ekonomi tahun 2001 telah dibarengi dengan meningkatnya tekanan terhadap mata uang rupiah dan laju inflasi. Untuk itu agar ancaman proses pemulihan ekonomi tidak semakin memperburuk situasi perekonomian nasional, maka perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam mengambil berbagai macam kebijakan. Tulisan ini membahas tentang bagaimana peluang pemerintah dapat "menyelamatkan" perekonomian Indonesia melalui komponen-komponen fiskal dan moneter secara efektif.

Kata kunci: country risk, pemulihan ekonomi, fiskal, moneter

PENDAHULUAN

utang luar negeri swasta juga belum secepat yang diharapkan. Besarnya beban pengeluaran pemerintah, terutama untuk pembayaran bunga utang dan subsidi, mengakibatkan terhambatnya pemulihan ekonomi dan kekuatan akan kelangsungan fiskal dalam jangka menengah.


GAMBARAN KONDISI OBYEKTIF APBN 2001

APBN 2001 memiliki tujuan strategis dalam pengelolaan keuangan negara, karena disamping merupakan Rencana Pembangunan Tahunan (Repelita) pertama dari pelaksanaan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), juga merupakan tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Strategi umum kebijakan fiskal yang akan ditempuh pada tahun kalender 2001 adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dalam negeri, baik penerimaan pajak maupun bukan pajak.
3. Mengurangi subsidi
4. Menerapkan pembagian dana perimbangan

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN 2001 adalah seperti ditampilkan dalam Tabel 1 berikut ini.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tabel 1. Asumsi Dasar Penyusunan APBN 2001</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Asumsi</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>PDB a. d. Harga Berlaku (Trihun rupiah)</td>
</tr>
<tr>
<td>Pertumbuhan Ekonomi (%)</td>
</tr>
<tr>
<td>Laju Inflasi (%)</td>
</tr>
<tr>
<td>Harga Minyak Mentah ($ per barrel)</td>
</tr>
<tr>
<td>Produksi Minyak (Juta per hari)</td>
</tr>
<tr>
<td>Nilai tukar (Rp/$)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

\(^1\)Periode April s.d Desember
Sumber: Departemen Keuangan
Tabel 2.
APBN 2001 dan Pokok-Pokok Penyesuaian
(Rp Triliun)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rincian</th>
<th>APBN 2001</th>
<th>% PDB</th>
<th>Proyeksi Dasar (kurs 9600)</th>
<th>% PDB</th>
<th>Langkah Kebijakan</th>
<th>Revisi</th>
<th>% PDB</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A. Total Penerimaan</td>
<td>263,2</td>
<td>18,5</td>
<td>276,1</td>
<td>18,7</td>
<td>8,5</td>
<td>284,7</td>
<td>19,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Pajak</td>
<td>179,9</td>
<td>12,6</td>
<td>181,9</td>
<td>12,4</td>
<td>7,0</td>
<td>189,0</td>
<td>12,8</td>
</tr>
<tr>
<td>1. PPN</td>
<td>48,9</td>
<td>3,4</td>
<td>50,7</td>
<td>3,5</td>
<td>6,5</td>
<td>57,2</td>
<td>3,9</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Cukai</td>
<td>17,1</td>
<td>1,2</td>
<td>17,1</td>
<td>1,2</td>
<td>0,5</td>
<td>17,6</td>
<td>1,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Bukan Pajak</td>
<td>83,3</td>
<td>5,8</td>
<td>94,2</td>
<td>6,4</td>
<td>1,5</td>
<td>95,7</td>
<td>6,5</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Kehulanan</td>
<td>.</td>
<td>.</td>
<td>2,5</td>
<td>0,2</td>
<td>0,5</td>
<td>3,0</td>
<td>0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Bagian laba BUMN</td>
<td>10,5</td>
<td>0,7</td>
<td>7,5</td>
<td>0,5</td>
<td>0,5</td>
<td>8,0</td>
<td>0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Bukan Pajak lainnya</td>
<td>8,4</td>
<td>0,6</td>
<td>8,3</td>
<td>0,6</td>
<td>0,5</td>
<td>8,8</td>
<td>0,6</td>
</tr>
<tr>
<td>B. Total Belanja</td>
<td>315,8</td>
<td>22,2</td>
<td>363,9</td>
<td>24,8</td>
<td>(22,6)</td>
<td>341,0</td>
<td>23,2</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Belanja Pusat</td>
<td>234,1</td>
<td>16,4</td>
<td>277,3</td>
<td>19,0</td>
<td>(17,7)</td>
<td>259,5</td>
<td>17,8</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Belanja Pegawai</td>
<td>40,0</td>
<td>2,8</td>
<td>40,2</td>
<td>2,7</td>
<td>(2,0)</td>
<td>38,2</td>
<td>2,6</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Aneka Subsidi</td>
<td>54,0</td>
<td>3,8</td>
<td>82,2</td>
<td>5,6</td>
<td>(9,3)</td>
<td>72,8</td>
<td>5,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Dana Kontinjensi</td>
<td>9,9</td>
<td>0,7</td>
<td>9,9</td>
<td>0,7</td>
<td>(3,0)</td>
<td>6,9</td>
<td>0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Belanja Pembangunan</td>
<td>44,0</td>
<td>3,1</td>
<td>45,4</td>
<td>3,1</td>
<td>(3,3)</td>
<td>42,1</td>
<td>2,9</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Dana Perimbangan</td>
<td>81,7</td>
<td>5,7</td>
<td>86,5</td>
<td>5,9</td>
<td>(5,1)</td>
<td>81,4</td>
<td>5,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Defisit</td>
<td>(52,5)</td>
<td>3,7</td>
<td>(87,7)</td>
<td>(6,0)</td>
<td>31,4</td>
<td>(56,3)</td>
<td>(3,8)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Draft Pemerintah

Keadaan keuangan pemerintah pada tahun 2001 direncanakan akan mengalami defisit sebesar Rp. 52,5 triliun atau 3,7 % dari PDB. Hal ini disebabkan karena penerimaan negara hanya sebesar Rp. 263,2 triliun sedangkan pengeluaran sebesar Rp.3 5,8 triliun. Pada kenyataannya defisit anggaran mengalami pembengkakan, yaitu sebesar Rp. 87,7 triliun atau 6,0 % dari PDB, sehingga mengalami pembengkakan sebesar Rp. 35,2 triliun. Hal ini disebabkan karena asumsi APBN yang digunakan oleh pemerintah terlalu rendah, terutama dalam hal mematok nilai kurs rupiah terhadap dollar (tabel 1.), yaitu sebesar Rp. 7.000 (dalam kenyataannya nilai kurs diatas Rp.10.000.). Hal ini berakibat proyeksi yang dilakukan oleh pemerintah banyak yang meleset.

utang luar negeri yaitu sebesar Rp. 93,5 triliun atau sebesar 6,6 % dari PDB.

Tahun 2001 merupakan tahun yang sangat menentukan untuk bisa menjaga mengatasi pembengkakan defisit anggaran dimasa mendatang. Sebab kalau gagal maka prospek APBN 2002 akan memburuk. Pemerintah berusaha mengatasi defisit APBN dengan jalan sebagai berikut:

1. Peningkatan basis pajak, cukai dan pendapatan sumberdaya alam.
2. Pengurangan Subsidi.
3. Perampingan dan refocusing belanja pembangunan.
4. Realokasi dana desentralisasi secara efisien dan efektif.
5. Tambahan privatisasi.

Hal ini tidak bisa menjadi dasar pemerintah untuk bersikap mem-babi buta meningkatkan penerimaan pajak. Kebijaksanaan menaikkan pajak harus dikaji secara hati-hati dengan memperhatikan tiga prinsip sebagai berikut:

1. Pajak bukan hanya alat penerimaan tetapi alat regulatory, yang bisa mengatur bagaimana sektor-sektor ekonomi dapat berkembang.
3. Net benefit dari pemungutan pajak jangan sampai menjadi net withdrawal dari masyarakat, yang berarti ada penarikan dana bersih dari masyarakat.

Revisi APBN yang dilakukan oleh pemerintah akan menghasilkan peningkatan anggaran senilai Rp. 22,8 triliun dan peningkatan penerimaan sebesar Rp. 8,5 triliun. Sisi penerimaan dilakukan peningkatan melalui kenaikan tarif PPN yang ditargetkan menambah venerimaan Rp. 6,5 triliun, cukai Rp. 300 milyar, kebutuhan Rp. 500 milyar, penerimaan laba BUMN Rp. 500 milyar, dan penerimaan bukan pajak Rp. 500 milyar.


Dilihat dari rencana kenaikan tarif PPN 2,5 % yang dipukul rata bagi semua barang, langkah ini dinilai tidak adil karena PPN tidak pernah menjadi instrumen keadilan riil bagi masyarakat kecil. Hal ini memberi tanda pemerintah sedang mengalami kepakanan fiskal. Hampir semua dipajahi tanpa mempertimbangkan tiga prinsip kebijakan pajak.

Dampak dari kenaikan pajak adalah harga akan melambung, dan ini berakibat beban masyarakat akan semakin berat dan laju inflasi yang ditargetkan sebesar 9,3 tidak akan
dapat terpenuhi, ditambah dengan kebijakan pemerintah yang akan mencabut subsidi sebesar 30 persen. Dalam kondisi pemulihan ekonomi yang masih labil, penerimaan negara dari pajak juga tidak seperti yang diharapkan, dan jika pemerintah masih sangat berharap dari pajak justru sektor riil yang akan terganggu dan masyarakat juga kena dampaknya.

HUTANG LUAR NEGERI DAN ANCAMAN PEMULIHAN EKONOMI


Tabel 3

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>Pemerintah</th>
<th>Swasta</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1991</td>
<td>45.72</td>
<td>19.97</td>
<td>65.69</td>
</tr>
<tr>
<td>1992</td>
<td>48.77</td>
<td>24.59</td>
<td>73.36</td>
</tr>
<tr>
<td>1993</td>
<td>52.46</td>
<td>28.13</td>
<td>80.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1994</td>
<td>58.63</td>
<td>37.88</td>
<td>96.51</td>
</tr>
<tr>
<td>1995</td>
<td>59.59</td>
<td>48.24</td>
<td>107.83</td>
</tr>
<tr>
<td>1996</td>
<td>55.31</td>
<td>54.87</td>
<td>110.18</td>
</tr>
<tr>
<td>1997</td>
<td>53.87</td>
<td>80.93</td>
<td>134.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Dari gambaran utang yang melanda Indonesia, dampak apa yang akan ditimbulkan dari kondisi utang yang sudah tidak wajar? Dari hasil kajian Bank Indonesia ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi:

1. Dari sisi moneter, posisi utang yang terlalu tinggi akan menimbulkan depresiasi terhadap nilai tukar rupiah.

2. Dari sisi fiskal, beban utang yang besar akan mengurangi ruang gerak pemerintah dalam memberikan rang-sangan bagi pemulihan kegiatan ekonomi.

3. Apabila tekanan inflasi akibat depresiasi rupiah tersebut tidak diredam, maka akan mengurangi dampak positif depresiasi rupiah terhadap transaksi berjalan.

4. Dari sisi moneter, pilihan kebijakan yang dapat diambil dalam meredam inflasi adalah kebijakan moneter yang ketat.

5. Dari sisi fiskal, pilihan kebijakan dapat diambil untuk meredam kenaikan inflasi adalah dengan menciptakan surplus anggaran. Namun menjadi-kan APBN surplus melalui peningkatan penarikan pajak, justru akan berdampak negatif terhadap proses pemulihan ekonomi.

Dari hasil kajian Bank Indonesia, ternyata masalah utang luar negeri yang dihadapi oleh Indonesia sangat berat dan ini perlu dicari solusinya, sehingga tidak semakin memperburuk situasi ekonomi yang memang sudah terpuruk.

Tabel 4.
Komposisi Utang Luar Negeri Indonesia Menurut Jangka Waktu per Januari 2001 (dalam juta dollar AS)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sektor</th>
<th>Kurang dari setahun</th>
<th>Lebih dari setahun</th>
<th>Posisi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pemerintah</td>
<td>4.296</td>
<td>69.930</td>
<td>74.226</td>
</tr>
<tr>
<td>Swasta:</td>
<td>21.013</td>
<td>44.974</td>
<td>65.987</td>
</tr>
<tr>
<td>- Bank</td>
<td>1.947</td>
<td>5.943</td>
<td>7.890</td>
</tr>
<tr>
<td>- PMA</td>
<td>7.520</td>
<td>22.183</td>
<td>29.703</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>25.309</td>
<td>114.904</td>
<td>140.213</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Bank Indonesia
PENUTUP

Dari hasil paparan di atas menunjukkan bahwa ancaman proses pemulihan ekonomi semakin nyata. Untuk itu agar ancaman proses pemulihan ekonomi tidak semakin menperburuk situasi perekonomian nasional, maka perlu diperhatikan oleh pemerintah terutama dalam mengambil kebijaksanaan, yaitu:

1. Di bidang pengendalian moneter, khususnya mengantisipasi potensi tekanan pada inflasi dan nilai tukar.
2. Di bidang perbankan, upaya penyelesaian rekapitalisasi perbankan dan resukturisasi dana usaha, khususnya melalui penyelesaian kredit-kredit bermasalah akan terus ditingkatkan.
4. Terkait dengan peran fiskal bagi kegiatan ekonomi, perlu menempuh upaya untuk memprioritaskan pengeluaran untuk memberdayakan potensi-potensi ekonomi.
5. Terkait dengan penatausahaan obligasi pemerintah dan mendorong pengembangan pasar skunder obligasi agar dapat membantu secara tidak langsung proses restrukturisasi perbankan nasional.

Berbagai langkah di atas diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan sekaligus untuk membangun kepercayaan pelaku ekonomi dan publik atas prospek ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA